

Program Pengentasan Kemiskinan melalui Penajaman Unit Pengelola Keuangan

I. PENDAHULUAN

Pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran, yang berkaitan dengan aspek ekonomi, dapat diukur dengan tingkat produksi (GDP), pengeluaran (GNP), dan pendapatan (GNY). Sedangkan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh aspek nonekonomi, misalnya kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari proses pembangunan yang mencakup usaha-usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai pendapatan riil per kapita, karena kenaikan ini mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

Syarat utama pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pembangunan bertumpu pada kemampuan ekonomi dalam negeri, atau tepatnya pada kemandirian. Kemandirian mengandung arti bahwa proses pembangunan diciptakan dari setiap anggota masyarakat, oleh setiap anggota masyarakat, dan untuk setiap anggota masyarakat.

Dalam pembangunan ekonomi dikenal adanya perubahan struktur, yaitu dari masyarakat yang kegiatan utama berfokus pada kegiatan pertanian (primer), kemudian beralih ke kegiatan industrial (sekunder), dan meningkat menjadi sektor jasa (tersier). Kegiatan ekonomi meningkat dari cara-cara (teknologi) yang tradisional kemudian beranjak menjadi semi mekanis dan akhirnya teknologi canggih. Proses ini sering pula diartikan sebagai proses modernisasi. Proses perubahan struktur yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati, dan yang menikmati haruslah yang menghasilkan sesuai dengan harapan tumbuhnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

Dalam kerangka perubahan struktur seperti itu, berbagai bantuan dana, misalnya, untuk pembangunan prasarana dan sarana yang dialokasikan untuk masyarakat melalui berbagai program pembangunan, khususnya bantuan pembangunan daerah, harus ditempatkan sebagai stimulan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di daerah. Peran bantuan dana, prasarana dan sarana tersebut menggantikan tabungan yang semestinya dihimpun dari kemampuan masyarakat di daerah. Strategi pembangunan daerah yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan harus dipahami sebagai sebuah proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat di daerah.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam kegiatan produksi, disamping kualitas tenaga kerja dan jumlah input lain, faktor teknologi sangat menentukan. Penggunaan teknologi yang tepat sangat mempengaruhi kegiatan pembangunan. Dalam kaitannya dengan proses produksi, penggunaan teknologi memiliki tiga tujuan yaitu ; *pertama*, menghemat sumber daya

alam (*natural resources saving*). *Kedua*, menghemat modal (*capital saving* atau *labor intensive*). Dan, *ketiga*, menghemat tenaga kerja (*labor saving* atau *capital intensive*). Dengan adanya inovasi, pengembangan teknologi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, produksi akan naik, dan terjadi surplus. Selanjutnya surplus tersebut digunakan untuk perluasan investasi, baik untuk memperbarui atau menambah barang modal maupun untuk mengembangkan teknologi produksi.

Pada dasarnya, proses pembangunan ekonomi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan pendapatan riil perkapita, dan hasil pembangunan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat secara merata. Hal ini akan terjadi apabila tiga dasar terpenuhi, yakni : *pertama*, *full employment* atau kondisi tenaga kerja penuh (partisipasi) artinya bahwa semua faktor-faktor produksi dan pelaku ekonomi ikut serta dalam kegiatan ekonomi; *kedua*, homogenitas, artinya semua pelaku ekonomi memiliki faktor produksi, kesempatan berusaha, dan kemampuan menghasilkan yang sama; dan *ketiga*, mekanisme pasar berjalan secara efisiensi, artinya interaksi antar pelaku ekonomi yang terjadi dalam suatu keseimbangan.

Asumsi itu bersifat normatif dan tidak selalu bahkan sulit untuk dipenuhi. Artinya proses pembangunan tidak melibatkan seluruh (tidak semua) pelaku ekonomi dan peningkatan pendapatan sebagai hasil dari proses pembangunan tersebut tidak dinikmati oleh seluruh penduduk. Secara natural ada sebagian penduduk yang tidak ikut serta dalam menghasilkan sehingga tidak berhak menikmati hasil pembangunan. Mekanisme pasar tidak berlangsung dengan natural, yakni adanya kekuatan tunggal baik di sisi produksi (monopoli) ataupun di sisi konsumsi (monopsoni) sehingga distribusi manfaat tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing pelaku ekonomi. Pasar tidak berfungsi secara wajar atau sering disebut dengan *market failures*. Keadaan seperti ini merupakan suatu masalah yang muncul dalam pembangunan.

II. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang ada sudah sejak lama dan hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi” dalam kehidupan. Pengertian kemiskinan sendiri sebagai suatu konsep ilmiah yang lahir sebagai dampak ikutan dari istilah pembangunan. Karena itu dalam setiap pembahasan tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting. Pada tahap ini, kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan yang keberadaannya ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Secara bersamaan, kenyataan tersebut bukan saja menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi juga memperlihatkan adanya suatu mekanisme dan proses yang tidak beres dalam pembangunan.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan aset produksi sehingga semakin lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya, gejala tersebut memunculkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan.

III. UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Hal ini berarti pemberian kesempatan yang luas bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Pemberian kesempatan dan peningkatan kemampuan penduduk miskin menyangkut kemudahan untuk memperoleh sumber daya, mendayagunakan kemajuan teknologi, memanfaatkan pasar secara terus menerus, serta mendapatkan layanan dari berbagai sumber pembiayaan.

Kemiskinan yang harus ditanggulangi mencakup permasalahan pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak aspek. Pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam menghasilkan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata. Ini semua pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang, dan kemudian, menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Perbedaan struktur masyarakat yang telah ikutserta dalam proses pembangunan dengan yang masih tertinggal menyebabkan keadaan kesenjangan atau kemiskinan struktural. Permasalahan itu harus dapat ditangani secara menyeluruh, seksama, dan bertahap agar tidak menjurus pada kecemburuan dan gejolak sosial yang dapat mengganggu kelancaran dan kesinambungan pembangunan.

Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus (supas) tahun 1995, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 194,8 juta jiwa (BPS, 1998). Persebarannya antar propinsi masih sangat tidak merata, antara lain sebagian besar (59 persen) penduduk tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 7 persen dari luas seluruh wilayah daratan Indonesia. Ditinjau dari sudut daerah perdesaan dan daerah perkotaan ternyata bahwa sungguhpun sudah terjadi penurunan dari tahun ke tahun, namun jumlah dan persentase penduduk yang tinggal dan hidup di daerah perdesaan tetap masih lebih besar.

Selanjutnya untuk data kemiskinan, baik dalam jumlah maupun persentasenya, ternyata penduduk miskin jauh lebih besar yang berada di perdesaan dibandingkan dengan yang ada diperkotaan. Lebih-lebih lagi akibat krisis ekonomi akhir-akhir ini (BPS, 1998), jumlah penduduk miskin yang ada di perdesaan sebanyak 56,8 juta jiwa atau sebesar 71,5 persen dari jumlah penduduk miskin Indonesia secara keseluruhan serta merupakan 45,6 persen dari jumlah penduduk desa di Indonesia secara keseluruhan.

Tabel . Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan
Tahun 1976-1998

Tahun	Penduduk Miskin di Desa (juta)	Persentase thd Total Penduduk Desa (%)	Persentase thd Total Penduduk Miskin
1976	44.2	40.4	81.5
1978	38.9	33.4	82.4
1980	32.8	28.4	77.5

1981	31.3	26.5	77.1
1984	25.7	21.2	73.4
1987	20.3	20.1	67.7
1990	17.8	14.3	65.4
1993	17.2	13.8	66.4
1996	15.3	12.3	68.0
1998	56.8	45.6	71.5

Sumber : Data BPS, Statistik Indonesia 1997

Dari data pada tabel di atas ternyata bahwa persentase total penduduk miskin di daerah perdesaan tetap tinggi sekali, bahkan meningkat pada tahun-tahun belakangan ini khususnya sejak tahun 1990. Pada kondisi Juni tahun 1998, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sekitar 71,5 persen terhadap total penduduk miskin di Indonesia. Suatu jumlah yang sangat besar, yang diperkirakan lebih besar lagi terjadi di sepanjang tahun 1999 dan 2000.

Kunci bagi pemerintah untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia, tidak lain adalah mengembalikan arah pembangunan ke sektor primer seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan. Sebab mayoritas penduduk Indonesia hidup dan mencari nafkah dalam sektor primer. Guncangan krisis yang dialami saat ini hanya bisa diatasi dengan mengembalikan kemampuan diri sendiri, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang ada di Indonesia.

Begitupula dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah harus mengembalikan keberadaan pada manusia sebagai pelaku sektor primer. Peran pemerintah hanya sekedar fasilitator, memberikan peluang dan kesempatan agar masyarakat mampu merumuskan langkah mereka sendiri.

Tiga strategi harus dilakukan, *pertama*, pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi prioritas yang menjamin pembangunan pada sektor primer. *Kedua*, strategi penyiapan berupa pemberdayaan masyarakat, dan, *ketiga*, strategi perlindungan sebagai paradigma baru dalam pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan.

Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan masyarakat itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, dalam hal ini rakyat yang berpendapatan rendah, miskin, dan terbelakang, khususnya dalam kehidupan ekonominya. Jadi pemberdayaan itu adalah upaya untuk membangun daya dan tenaga yang dimiliki masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk dapat mengembangkan dalam kehidupannya.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, sikap tanggung jawab, adalah merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula halnya pembaruan lembaga sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Pembangunan kelembagaan yang terutama adalah kelembagaan perdesaan. Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa perlu diperkuat agar

pembangunan nasional yang berbasis pembangunan perdesaan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam hal ini pemerintah hanya perlu menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan dan menunjang timbul dan berkembangnya potensi masyarakat kelompok berpendapatan rendah.

Pembangunan yang muncul dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang perlu terus dimantapkan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui strategi ini prinsip bantuan langsung, peranserta aktif, efisiensi, dan transparansi, serta produktifitas masyarakat menjadi pedoman dalam setiap langkah pembangunan nasional. Pemahaman tentang strategi demikian harus utuh sehingga bantuan program pembangunan dapat benar-benar efektif serta mampu meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Program-program pembangunan perlu dipahami sebagai upaya pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Model pembangunan partisipatif telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan dimantapkan dalam program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Kemudian program tersebut disempurnakan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) dan dilanjutkan dengan program Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal, khususnya di perdesaan dalam wadah musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan (atau dalam suatu area kluster/kelompok). Model pembangunan partisipatif menekankan upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat. Segenap unsur masyarakat khususnya aparat pemerintah daerah diharapkan dapat membantu menyiapkan masyarakat untuk menerima bantuan program bagi kegiatan ekonomi produktif. Penyiapan masyarakat dalam wadah kelompok masyarakat (pokmas) diharapkan dapat tumbuh menjadi suatu lembaga yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Peran lembaga kemasyarakatan desa seperti Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Pembinaan Desa (KPD), dan lain-lain perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Upaya ini pada gilirannya mampu menciptakan sinergi pembangunan keluarga sejahtera dalam 'suasana kota modern' di desa.

Upaya dalam memperkuat lembaga keuangan di daerah juga perlu mendapat perhatian. Lembaga keuangan yang diharapkan dapat mendorong pengembangan dan pelestarian bantuan. Lembaga keuangan yang muncul perlu sedikitnya memenuhi empat syarat, yaitu ; *pertama*, lembaga tersebut mencerminkan kebutuhan serta kemampuan masyarakat sehingga diakui keberadaannya dan memenuhi syarat legal dan formal; *kedua*, lembaga keuangan tersebut harus mudah diawasi, dipantau, dan mudah dikelola oleh masyarakat setempat; *ketiga*, lembaga tersebut harus menguntungkan bagi masyarakat yang dilayani maupun bagi kelangsungan lembaga keuangan itu sendiri; dan

keempat, lembaga itu harus dapat memberikan pelayanan keuangan yang menjangkau masyarakat sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat.

Peran lembaga keuangan dalam pengembangan dan pelestarian bantuan adalah ; *pertama*, mempersiapkan terciptanya akses atau kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan. *Kedua*, mempersiapkan masyarakat lapisan bawah untuk dapat mendayagunakan bantuan tersebut sehingga dapat menjadi modal bagi kegiatan usaha. *Ketiga*, menanamkan pengertian bahwa bantuan yang diberikan harus dapat menciptakan akumulasi modal dari surplus yang diperoleh dari kegiatan sosial ekonomi.

Unit Pengelola Keuangan (UPK) di tingkat desa maupun kecamatan perlu dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan dana bantuan. Pengelolaannya dapat dilakukan sendiri oleh anggota masyarakat. UPK yang sudah ada dan berkembang dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) perlu dipertajam dan diperluas fungsi dan perannya. Fungsi UPK tidak hanya sebagai lembaga pengepul dana bantuan tetapi harus dapat benar-benar berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengelola keuangan dengan memberikan bantuan stimulan dana sebagai modal yang dapat bergulir kepada kelompok masyarakat. Sehingga apabila program pembangunan tersebut selesai maka lembaga UPK itu tetap terus berfungsi menggulirkan dananya kepada pokmas yang lain.

UPK ini berperan sebagai lembaga keuangan milik masyarakat yang dapat menampung dan mengelola berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah. Sehingga berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah, dananya dapat langsung dikontrol dengan mudah oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian kebocoran-kebocoran dana bantuan program pembangunan dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan. Kontrol Publik ini merupakan upaya yang sangat efektif dalam mengantisipasi segala kemungkinan kebocoran dalam pengelolaan program-program pembangunan di daerah.

UPK ini dapat berkembang menjadi lembaga keuangan alternatif milik masyarakat yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Lembaga keuangan ini dapat menjadi embrio lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip perbankan yang pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan (kooperatif). Dalam perkembangan selanjutnya lembaga keuangan ini dapat berbadan hukum misalnya seperti koperasi.

Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat ini diprioritaskan pada masyarakat miskin di desa tertinggal, yaitu ; berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha

Kegiatan ini perlu diarahkan agar bantuan dana yang diberikan kepada daerah khususnya masyarakat miskin di desa tertinggal dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan yang pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat.

IV. PENUTUP

Sebagian besar lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal dan hidup di daerah perdesaan, dimana dalam kondisi tahun 1998 jumlah penduduk miskin makin meningkat menjadi sebesar 45,6 persen dari total penduduk desa, dan merupakan 71,5

persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia keseluruhannya. Dalam hubungan ini terhadap penduduk miskin dan berpendapatan rendah di daerah perdesaan itu perlu dilakukan pemberdayaan ekonominya sehingga mereka akan dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangannya.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dikaitkan dengan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai dasar pemupukan modal. Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian bantuan dana secara stimulan sebagai modal usaha, pelatihan yang tepat, penerapan teknologi tepat guna, pembangunan prasarana pendukung, penyediaan sarana penunjang, dan penguatan kelembagaan sebagai wadah usaha masyarakat. Dalam kerangka pemupukan modal, berbagai bantuan baik yang diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat yang sudah maju, perlu ditempatkan sebagai pemacu proses perubahan dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat menuju pada suatu kehidupan yang lebih maju.

Pemupukan modal merupakan dasar pengembangan ekonomi rakyat dalam proses transformasi struktural menuju pada masyarakat maju dan berkembang. Pemahaman tentang aspek keuangan yang benar perlu ditanamkan kepada setiap pelaku ekonomi di setiap lini tingkatan. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan merupakan dasar dari pemupukan modal ekonomi rakyat.

Unit Pengelola Keuangan yang diperkenalkan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) perlu dipertajam sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. UPK ini harus benar-benar dapat berfungsi mengelola bantuan dengan memutar dananya ke masyarakat dengan memberikan modal usaha secara stimulan untuk dapat mengembangkan kehidupan sosial ekonominya.

Kontrol publik dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung dengan mengoptimalkan UPK sebagai lembaga keuangan milik masyarakat untuk menampung dan mengelola bantuan dana dari berbagai program pembangunan yang masuk ke desa maupun kecamatan sehingga penggunaan bantuan dana pembangunan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Terwujudnya lembaga keuangan yang muncul dari prakarsa masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat sendiri tentu keberhasilannya dapat dilestarikan dan ditumbuhkembangkan di daerah lain.

Peran pemerintah diharapkan dapat menciptakan peluang dan kesempatan usaha yang lebih besar bagi masyarakat miskin. Dalam tataran mikro, model pemberdayaan sebagai dasar penanggulangan kemiskinan yang telah dikembangkan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan, sangat efektif untuk menjembatani upaya yang dilakukan melalui berbagai program pembangunan.

Dimensi kemiskinan yang begitu luas mengharuskan setiap upaya penanggulangan kemiskinan dalam tataran makro perlu dilakukan secara terpadu yang meliputi berbagai program pembangunan baik sektoral maupun regional. Dalam hal ini yang diperlukan penajaman program dan kegiatan sehingga hasilnya lebih optimal dan dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat miskin.